

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Darji Darmadiharjo dan shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001).
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita*, (Jakarta: Cetakan Kedua Puluh Enam, 1996).
- Lontoh, Rudy A, dkk, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015).
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2004).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002).
- _____, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009).
- _____, *Sejarah Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Utrecht & Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ihtiar Baru, 1983).
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).
- Zakiah, S.H., M.H, *Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015).

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perubahan Nomor 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Putusan :

Putusan Pengadilan Niaga No. 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby tanggal 17 September 2018.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt/Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2019.

